

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

2021



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor: 050 /KPTS- 006 . A /DKISP/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;

- c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021- 2026;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
 Pada tanggal 25 Maret 2021
 Dinas Komunikasi, Informatika,
 Statistik dan Persandian
 Kabupaten Pangandaran



JAJA NURLIHUDA, ST., M.Dev.Plg.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: /KPTS- /DKISP/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Keudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si
3.	Anggota	Kepala Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian	BENNY, S.Sos
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	DUDUNG CAHYADI, S.Pd., M.Pd.
		Kepala Seksi Pengembangan E-Government dan Pengelolaan Infrastruktur TIK	THOYIB WAHYUDIN, S.Kom
		Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik	IDAYAT RUSLAN, S.Sn.
		Kepala Seksi Statistik Sektoral	AKA ZAKARIA, S.Pd.
		Plt. Kasubag Program dan Keuangan	ADI BANGBANG ARUMAN, S.Tr.Kom
		Staf	DANIL FATHURROHMAN
		Staf	IQBAL ADITYA PANGESTU, S.Kom
		Staf	SHABRINA LARASATI R., A.Md.
		Staf	TESYA SRI SEPTIANI, S.AP.

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran


JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg.
Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor: 050 /KPTS-015.0 /DKISP/2021

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

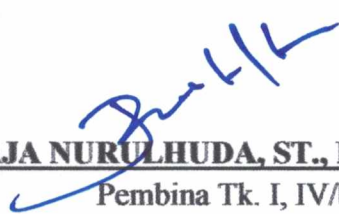
- KETIGA** : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 meliputi :
- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
 - b. **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statisti dan Persandian, Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 - c. **BAB III : ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
 - d. **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
 - e. **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
 - f. **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
 - g. **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 23 September 2021
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran


JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19720106 199803 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: /KPTS- /DKISP/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Keudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	Dra. LILIS KUSUMAWATI, M.Si
3.	Anggota	Kepala Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian	BENNY, S.Sos
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	DUDUNG CAHYADI, S.Pd., M.Pd.
		Kepala Seksi Pengembangan E-Government dan Pengelolaan Infrastruktur TIK	THOYIB WAHYUDIN, S.Kom
		Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik	IDAYAT RUSLAN, S.Sn.
		Kepala Seksi Statistik Sektoral	AKA ZAKARIA, S.Pd.
		Plt. Kasubag Program dan Keuangan	ADI BANGBANG ARUMAN, S.Tr.Kom
		Staf	DANIL FATHURROHMAN
		Staf	IQBAL ADITYA PANGESTU, S.Kom
		Staf	TESYA SRI SEPTIANI, S.AP.

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19720106 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin -Nya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

Sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan menteri dalam negeri no 54 tahun 2010 bahwa instansi di Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Strategis SKPD.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data yang akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, dan pembahasan bersama. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melancarkan pelaksanaan serta memberikan masukan agar Penyusunan Renstra yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi

Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandraan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Parigi, 23 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,	6
STATISTIK DAN PERSANDIAN	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	11
2.5. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12
BAB III	14
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	14
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat	16
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	16
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	16
BAB IV	18
TUJUAN DAN SASARAN	18
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18
BAB V	21
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	21
BAB VI	23
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	23
BAB VII	24
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	24
BAB VIII	26
PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Pangandaran sebagai rencana kerja untuk lima tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai penjabaran rencana kerja Bupati yang tertuang dalam RPJMD yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam upayanya mewujudkan tata kelola atau tata laksana pemerintahan yang berbasis elektronik atau terkomputerisasi.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyusunannya terlebih dahulu dengan menelaah visi dan misi Bupati sebagai janjinya kepada masyarakat serta program kerja Bupati untuk lima tahun yang tertuang dalam RPJMD.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran periode 2021-2026. Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra tahun 2021-2026 akan berfokus mewujudkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima dengan tujuan meningkatnya tatalaksana pemerintahan berbasis elektronik.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

1.3. Maksud dan Tujuan

2.1.2. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian dalam rangka ikut mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati Terpilih masa bakti 2021 -2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bisa sinergis, koordinatif, kolaboratif yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

2.1.3. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar penanganan pembangunan daerah dan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 (Lima) tahun kedepan;
2. Menerjemahkan Visi dan Misi Daerah kedalam sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 - 2026;
3. Menetapkan berbagai program prioritas disertai dengan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 - 2026;
4. Menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian dan pengukuran keberhasilan pembangunan periode 2021 - 2026.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026, terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari Renstra Diskominfo yang merupakan kata simpulan dari semua isi Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pasal 3 ayat 15 yang menyebutkan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, sebagian urusan layanan e-government, pengelolaan infrastruktur dan statistik dan melaksanakan sebagian urusan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang layanan e-government, pengelolaan infrastruktur dan persandian dan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang layanan e-government, pengelolaan infrastruktur dan persandian dan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang e-government, pengelolaan infrastruktur dan persandian dan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Sarana dan prasarana

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Minibus	2	baik
2	Motor	2	baik
3	Alat Ukur Global Positioning system	1	baik
4	Rak Kayu	2	baik
5	<i>Filling Cabinet</i> Besi	4	baik
6	Brangkas	1	baik
7	Lemari Sorok	1	baik
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-Lain	2	baik
9	CCTV	1	baik

10	Alat Penghancur Kertas	2	baik
11	Papan Pengumuman	1	baik
12	Meja Kerja Besi/Metal	1	baik
13	Meja Kerja Kayu	9	baik
14	Kursi Besi/Metal	1	baik
15	Kursi Kayu	11	baik
16	Meja rapat	2	baik
17	Meja Resepsionis	1	baik
18	Meja 1/2 Biro	27	baik
19	Kursi Rapat	8	baik
20	Kursi Tamu	1	baik
21	Meja Komputer	1	baik
22	Sofa	2	baik
23	Tulisan Staindles <i>Command Center</i>	1	baik
24	Lemari es	1	baik
25	AC	22	baik
26	Outdoor Unit	1	baik
27	Exhaust	2	baik
28	Alat dapur/Yong Ma	1	baik
29	Televisi	3	baik
30	<i>Wireless</i>	3	baik
31	Microphone	1	baik
32	Kaca Hias	3	baik
33	Karpet	1	baik
34	Senter	1	baik
35	Meja Pejabat Eselon II	1	baik
36	Meja Tamu Biasa	2	baik
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	baik
38	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	baik
39	Lemari Buku Untuk arsip Dinamis	5	baik
40	Audio Video Selector	1	baik
41	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	3	baik
42	<i>Camera+Attachment</i>	29	baik
43	<i>Proyektor+Attachment</i>	1	baik
44	Peralatan studio Lain-lain	3	baik
45	Tripod Kamera	2	baik

46	Lensa Kamera	1	baik
47	Alat Penyimpan Data	1	baik
48	Pesawat Telephone	2	baik
49	<i>Handy Talky</i>	3	baik
50	<i>Handphone</i>	4	baik
51	Peralatan Pemancar	1	baik
52	<i>Switcher</i> Antena	3	baik
53	<i>Switcher/</i> Menara Antena	2	baik
54	<i>Genset</i>	1	baik
55	<i>Voltmeter</i>	2	baik
56	Alat Ukur Takaran air	1	baik
57	<i>Frequency Counter</i>	1	baik
58	Digital <i>Handycam</i> VHSC	1	baik
59	Layar Proyektor	1	baik
60	<i>Thermometer</i>	1	baik
61	Mini Komputer	2	baik
62	<i>Local Area Network</i>	39	baik
63	P C Unit	5	baik
64	Laptop	15	baik
65	Note Bok	1	baik
66	Personal Komputer Lain	17	baik
67	<i>Magnetic Tape Unit</i>	2	baik
68	Peralatan Mini Komputer lai-Lain	2	baik
69	Monitor	14	baik
70	Printer	16	baik
71	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	130	baik
72	<i>Finger Print Scanner</i>	1	baik
73	<i>Server</i>	3	baik
74	<i>Router</i>	2	baik
75	Peralatan Jaringan Lain-Lain	14	baik
76	Tiang Antene	7	baik
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	baik
78	Jaringan Listrik	2	baik
79	Jaringan Distribusi	1	baik
80	Jaringan Listrik Lainnya	1	baik
81	Bahan Perpustakaan	1	baik

82	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	baik
83	Buku Ilmu Pengetahuan praktis	1	baik
84	Teknologi	1	baik
85	Aset Tetap dalam renovasi	3	baik
86	Aset Tidak Berwujud	7	baik
87	Software	5	baik
88	Kajian	2	baik

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah 18 orang.

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki – laki	14
2.	Perempuan	4
Total		18

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Tk. 1, IV/b	3
3.	Pembina, IV/a	2
4.	Penata Tk. 1, III/d	2
5.	Penata, III/c	1
6.	Penata Muda, III/a	4
7.	Pengatur, II/c	3
8.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1
9.	Juru Tk. I, I/d	1
Total		18

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	4
2.	S1	9
3.	D3	3
4.	SMA/SMK/Sederajat	2
Total		18

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No	Eselon	Jumlah (orang)
----	--------	----------------

1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	6
4.	Fungsional Tertentu	2
Total		12

Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Seksi	4
5.	Kepala Sub Bagian	2
6.	Pelaksana/Fungsional Umum	6
7.	Fungsional Tertentu	2
Total		18

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pelayanan yang manjadi tugas Kominfo adalah pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika yang salah satunya layanan *e-government* dan penyediaan infrastruktur TIK, keamanan informasi, layanan informasi dan komunikasi publik yang salah satunya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, dan pengelolaan data statistik sektoral .

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tantangan dan potensi program pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata. Peneydiaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank spot* di wilayah non komersil;
2. Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh lembaga pemerintahan daerah;
3. Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung utama pemanfaatan TIK;

4. Belum terintegrasinya aplikasi layanan *e-Government* antar SKPD. *E-Government (electronic government)* adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan pemerintah;
5. Perlunya penataan dan pembenahan tata kelola yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan, pembangunan dan penerapan SPBE;
6. Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan Statistik sektoral Kabupaten Pangandaran;
7. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral dikarenakan rendahnya pemahaman akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah;
8. Perlu adanya penataan regulasi dan peningkatan serta tata kelola statistik sektoral daerah, serta menunjang Satu Data Indoensia;
9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;
10. Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan statistik sektoral.

2.5 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kinerja dan Realisasi Tahun 2018

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	B	BB	101,77
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	3	3	100
3	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis elektronik	1	1,50	150

Kinerja dan Realisasi Tahun 2019

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	B	BB	134,9
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	3	1	0,33
3	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis elektronik	2	2,32	116

Kinerja dan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	B	A	125
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	5	0	0

3	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis elektronik	2,25	3,02	134
---	---	------	------	-----

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pangandaran adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data daerah sebagai kekayaan strategis pemerintah daerah. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Adapun beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank spot* di wilayah non komersil;
2. Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh Lembaga pemerintahan daerah;
3. Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung utama pemanfaatan TIK;
4. Belum terintegrasinya Aplikasi Layanan e-Government antar SKPD. E-Government (*electronic government*) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan pemerintah;
5. Perlunya penataan dan pembenahan tata Kelola yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan, pembangunan dan penerapan SPBE;
6. Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan statistik sektoral Kabupaten Pangandaran;
7. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral karena rendahnya pemahaman akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah;

8. Perlu adanya penataan regulasi dan peningkatan serta tata kelola statistik sektoral daerah, serta menunjang satu data Indonesia;
9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;
10. Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan statistik sektoral.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk menunjukkan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam agenda prioritas yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Pangandaran yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda RPJMD Tahun 2021 - 2026, yaitu:

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran

“ PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA “

Misi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran, antara lain :

1. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan;
2. Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dari enam Misi Pemerintah Daerah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian hadir untuk menyokong kesuksesan pembangunan pada Misi ke-5 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel dengan tujuan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

Untuk dapat menciptakan birokrasi yang melayani, efisien dan Akuntabel tentulah harus ada perubahan paradigma, pola dan cara dalam menghadirkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Hal yang paling realistis di era teknologi informasi seperti sekarang ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- SS.1 Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- SS.2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- SS.3 Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- SS.4 Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
- SS.5 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- SS.6 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
- SS.7 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- SS.8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- SS.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- SS.10 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur pola sebaran sehingga terjadi pemerataan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Pembagian wilayah itu sendiri diantaranya penentuan zona pendidikan, zona wisata dan agrowisata, zona industri, zona perdagangan, zona pemukiman, zona pertanian, zona perkebunan dan yang lainnya.

Tujuan penataan ruang itu sendiri adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien.

Diskominfo dalam merancang berbagai program/kegiatan harus ramah lingkungan. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika tidak lepas dari wawasan lingkungan sehingga ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat dari berbagai wilayah dapat tercapai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan diantaranya adalah :

- a. Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama kaitan penerapannya, mayoritas penggunaan aplikasi tanpa payung hukum,
- b. Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan dan berjalan masing-masing, kecenderungan dalam pembuatan/pengembangan aplikasi tidak dikoordinasikan dengan instansi lain yang terkait dengan bisnis proses yang akan disistemkan, ego sektoral masih sangat tinggi;

- c. Keterbukaan yang masih sangat lemah, masih tingginya anggapan bahwa semua data adalah rahasia padahal data yang telah diolah menjadi informasi haruslah disampaikan kepada publik dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya,
- d. Kemitraan dengan pihak lain baik swasta atau pemerintah daerah lain tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga kerjasama yang telah dijalin tidak terlihat hasil dan aksinya, kurangnya inisiatif menjadi hambatan tersendiri,
- e. Kemampuan SDM dalam pengelolaan pemanfaatan TIK masih dalam kategori rendah, tidak terdapatnya SDM yang benar-benar menguasai TIK sehingga tidak ada inisiator dan motivator sebagai penggerak pemanfaatan TIK secara optimal sebagai daya dukung pengelolaan proses bisnis pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4.1 Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu kepada tujuan RPJMD dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terkait pada tujuan yaitu “Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima”. Tujuan tersebut dicapai sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun/mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

4.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah.

Sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 - 2026 adalah :

“Implementasi Penyelenggaraan e-Government dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan pemerataan Informasi Publik”.

Sasaran tersebut disusun berdasarkan 3 Fokus utama urusan bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai leading sektor di bidang Layanan E-Government dan Infrastruktur TIK;
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang optimalisasi pemanfaatan TIK;
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah daerah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran yang menjadi prioritas urusan komunikasi dan informatika upaya pencapaiannya adalah mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi dan lebih berdaya guna, pendataan dan pemetaan sistem elektronik, pemanfaatan sarana media sosial.

Fokus pencapaian sasaran pada urusan persandian adalah pengamanan keaslian dokumen elektronik dengan pemanfaatan sertifikat elektronik.

Fokus. pencapaian sasaran pada urusan statistik adalah pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan data statistik sektoral.

4.2 Isu Startegis

1. Data dalam buku Kabupaten dalam angka tidak lengkap
2. Belum optimalnya penerapan kebijakan satu data
3. Cakupan Layanan Telekomunikasi belum merata pada setiap wilayah
4. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan
5. Penyebarluasan informasi publik belum optimal

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks SPBE			Indeks	3,02	2,38	2,5	2,75	3	3,1	3,2	3,2
			Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	%	n/a	76	79	p	85	88	90	90
				Persentase pengamanan informasi daerah	%	n/a	55	60	65	70	75	80	80
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	%	n/a	50	55	60	65	70	75	75
				Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	%	n/a	20	25	30	35	40	45	45
		Nilai Sakip			Nilai	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	81,25 - 85,00
			Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai AKIP	Nilai	89,26	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84	90,84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkannya.

Strategi yang akan ditempuh guna mewujudkan cita-cita pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain :

1. Menciptakan layanan pemerintah yang terbuka, efektif dan akuntabel.

Aparatur Pemerintahan itu sendiri perlu berbenahi untuk dapat meningkatkan kapasitas dan ketangguhan dalam mengelola diri, maka perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan manajemen sumberdaya untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam data..

2. Penerapan sistem e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi.

Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan pada setiap bisnis proses pemerintahan yang terintegrasi satu sama lainnya adalah sebagai upaya menghadirkan proses yang sederhana dan efisien sehingga dapat meringankan kinerja aparatur dan mendorong meningkatnya produktifitas kinerja.

Penggunaan aplikasi memang rentan terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya pengamanan sistem informasi yang terstandar (yaitu standar yang dikeluarkan oleh BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara]).

3. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik.

Membangun keterbukaan informasi publik membutuhkan upaya untuk membuka pola pikir dan kesadaran bahwa keterbukaan dapat menumbuhkan kepercayaan publik akan kehadiran pemerintah dalam membangun masyarakat.

4. Menghadirkan data statistik sektoral Kabupaten Pangandaran yang valid.

Pengukuran keberhasilan pembangunan dengan disajikannya publikasi data statistik sektoral sebagai bahan evaluasi sudah sejauh mana pembangunan dijalankan..

Untuk dapat mengimplementasikan strategi yang telah dipilih diperlukan dukungan kebijakan dari pemangku kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat berjalan dan dilaksanakan pada semua lini untuk suksesnya pembangunan.

Adapun arah kebijakan yang diambil untuk dapat menjalankan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, antara lain :

1. Meningkatkan layanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur dengan memberikan dorongan, motivasi, arahan, monitoring dan evaluasi.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur.
4. Penguatan kebijakan dan tatakelola penyelenggaraan e-government,

Kebijakan adalah dasar dari pelaksanaan atau penerapan suatu hal dalam pemerintahan, kebijakan adalah acuan atau pedoman penyelenggaraan baik itu kebijakan pusat atau provinsi dan diperkuat dengan diterbitkannya peraturan di daerah sebagai juklak dan juknis atau penegas penerapan suatu sistem penunjang pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sistem yang telah dibangun perlu dijalankan dan dalam perjalanannya memerlukan pengelolaan yang baik sehingga kinerja suatu sistem dapat optimal dan menghasilkan dayaguna.

5. Mengembangkan dan penguatan sistem dan infrastruktur e-government serta kelembagaannya, Perkembangan teknologi begitu cepat dalam laju pertumbuhannya, maka sistem yang ada perlu terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan teknologi terbaru, sistem elektronik memang rentan terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya penguatan dan pengamanan sistem informasi yang terstandar.

Dalam penerapan sistem elektronik tentu tidak bisa dihindarkan dari kebutuhan infrastrukturnya, semakin banyak sistem dan data akan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai juga, serta dibutuhkannya ketangguhan, kehandalan dan keamanan infrastruktur itu sendiri.

6. Mengintegrasikan Sistem Elektronik antar SKPD,

Mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa setiap sistem yang dibangun harus dapat diintegrasikan dengan yang lainnya, pengembangan sistem berbagi pakai dalam pengolahan data adalah suatu keniscayaan yang harus segera direalisasikan di Kabupaten Pangandaran.

7. Publikasi informasi publik kedalam website masing-masing OPD,

Salah satu bentuk keterbukaan informasi publik adalah dengan akselerasi publikasi informasi melalui aplikasi daring yaitu web site tiap-tiap perangkat daerah, sehingga dapat diakses oleh publik kapan saja dan dimana saja, informasi yang dipublikasikan tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan dan selalu diperbaharui secara up to date, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi.

8. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik,

Pedoman dan alur pelaksanaan kegiatan atau SOP, maka untuk terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan pelayanan publik maka perlu disusun dan ditetapkan SOP Pelayanan Publik berdasarkan bisnis proses dari masing-masing layanan yang diberikan.

9. Mengkoordinasikan penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Pangandaran dengan BPS, dalam hal ini BPS kabupaten Ciamis. Keterwakilan dalam pengambilan sampel akan menjadi tolok ukur tingkat akurasi perhitungan data statistik yang dihasilkan, sehingga akan merepresentasikan data yang akurat.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran**

VISI :Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa					
MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani,Efektif,Efisien,dan Akuntabel					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	Jumlah Aplikasi yang di manfaatkan / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	Optimaliasi pemanfaatan sistem elektronik yang di bangun dan di jalankan serta penghapusan sistem elektronik yang tidak terpakai	mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi dan lebih berdaya guna
		Persentase pengamanan informasin daerah	Jumlah aplikasi yang menerapkan sistem keamanan elektornik / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	peningkatan penerapan pengamanan sistem elektronik secara menyeluruh	pengamanan keaslian dokumen elektonik dengan pemanfaatan sertifikat elektronik
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	jumlah media penyebaran informasi publik yang terlaksana/ jumlah media penyebaran informasi publik yang ditargetkan X 100 %	optimalisasi sarana media sosial yang ada	pemanfaatan sarana media sosial
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	jumlah perangkat perangkat daerah yang menyerahkan publikasi statistik / jumlah seluruh perangkat daerah (produsen data)X 100 %	optimalisasi pemanfafatan forum satu data	pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan data statistik sektoral

	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	Nilai LHE Akip	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas	peningkatan akuntabilitas dan penguatan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026, program dan kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD, menguraikan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja program, data capaian awal dan kondisi kinerja akhir serta target kinerja dan kerangka pendanaannya. Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2021 - 2026 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai dan kolaboratif. Pendanaan pembangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan bersumber dari Rupiah Murni, APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan Bantuan APBN. Selain sumber pendanaan di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan yang berbasis elektronik. Berikut adalah table Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026.

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Akhir	
				2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024				
				TARGET	Rp.		TARGET	Rp.		TARGET	Rp.		TARGET	Rp.		TARGET	Rp.
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5,442,571,632		7,797,831,000		8,307,738,000		8,790,561,000		9,185,600,000					
	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Perentase laporan keuangan dengan kualitas baik,Perentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas, Perentase peningkatan kompetensi aparatur	n/a	90%	3,483,107,878	91%	4,489,831,000	92%	4,442,100,000	93%	4,672,738,000	94%	4,640,561,000	95%	4,835,600,000	4,855,600,000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu,Perentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu, Perentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	n/a	90%	27,000,000	91%	35,000,000	92%	36,300,000	93%	37,700,000	94%	39,100,000	95%	40,800,000	40,800,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	n/a	3 Dokumen	27,000,000	3 Dokumen	34,500,000	3 Dokumen	35,800,000	3 Dokumen	37,100,000	3 Dokumen	38,400,000	3 Dokumen	40,000,000	40,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaksanakan	n/a	-	-	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	600,000	1 Dokumen	700,000	1 Dokumen	800,000	800,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	n/a	90%	2,604,352,148	91%	2,335,000,000	92%	2,386,400,000	93%	2,637,800,000	94%	2,889,400,000	95%	2,741,200,000	2,741,200,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	n/a	20 Orang	2,335,362,148	21 Orang	2,500,000,000	23 Orang	2,550,000,000	25 Orang	2,600,000,000	27 Orang	2,650,000,000	29 Orang	2,700,000,000	2,700,000,000	
	Pelaksanaan Pestausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan	n/a	3 Dokumen	46,000,000	3 Dokumen	34,500,000	3 Dokumen	35,800,000	3 Dokumen	37,100,000	3 Dokumen	38,400,000	3 Dokumen	40,000,000	40,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan	n/a	-	-	1 Laporan	250,000	1 Laporan	300,000	1 Laporan	400,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	600,000	600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	n/a	-	-	1 Laporan	250,000	1 Laporan	300,000	1 Laporan	400,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	600,000	600,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	n/a	250 Unit	27,000,000	250 Unit	34,500,000	255Unit	35,800,000	260Unit	37,100,000	265 Unit	38,400,000	270 Unit	40,000,000	40,000,000	
	Pentausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah barang milik daerah pada sipd yang dikelola	n/a	7 dan 480 Unit	27,000,000	7 dan 480 Unit	34,500,000	7 dan 483 Unit	35,800,000	7 dan 490 Unit	37,100,000	7 dan 493 Unit	38,400,000	7 dan 500 Unit	40,000,000	40,000,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Perentase penghasilan retribusi yang diterima perangkat daerah	n/a	5%	28,600,000	5%	26,600,000	5%	27,700,000	5%	29,000,000	5%	30,300,000	5%	31,300,000	31,300,000	
	Pelaporan Pengeluaran Retribusi Daerah	Jumlah pengeluaran retribusi yang dilaporkan	n/a	1 Laporan	24,000,000	1 Laporan	26,600,000	1 Laporan	27,700,000	1 Laporan	29,000,000	1 Laporan	30,300,000	1 Laporan	31,300,000	31,300,000	
	Administrasi Kepagawelan Perangkat daerah	Perentase administrasi kepagawelan perangkat daerah yang baik	n/a	90%	22,920,000	91%	23,700,000	92%	24,800,000	93%	26,100,000	94%	27,400,000	95%	28,400,000	28,400,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawelan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepagawelan yang dilaksanakan	n/a	3 Kegiatan	22,000,000	3 Kegiatan	23,700,000	3 Kegiatan	24,800,000	3 Kegiatan	26,100,000	3 Kegiatan	27,400,000	3 Kegiatan	28,400,000	28,400,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	n/a	90%	340,297,630	91%	908,297,000	92%	455,988,000	93%	505,476,000	94%	530,511,000	95%	733,900,000	733,900,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	n/a	2 jenis	4,264,030	5 jenis	3,310,000	5 jenis	5,243,000	5 jenis	5,628,000	5 jenis	7,000,000	5 jenis	7,400,000	7,400,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	n/a	64 jenis	51,996,368	70 jenis	606,000,000	76 jenis	100,000,000	80 jenis	110,000,000	83 jenis	120,000,000	90 jenis	300,000,000	300,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	n/a	4 jenis	6,505,516	5 jenis	7,170,000	6 jenis	7,910,000	7 jenis	8,180,000	8 jenis	8,300,000	9 jenis	8,900,000	8,900,000	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	n/a	-	-	2,387,000	5 Jenis	2,775,000	5 Jenis	3,010,000	5 Jenis	3,311,000	5 Jenis	3,600,000	5 Jenis	3,600,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	n/a	8,000,000	3 Jenis	18,350,000	3 Jenis	18,860,000	3 Jenis	22,840,000	3 Jenis	24,500,000	3 Jenis	26,000,000	3 Jenis	26,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	n/a	18,000,000	1 Jenis	24,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	26,000,000	1 Jenis	27,400,000	1 Jenis	28,400,000	1 Jenis	28,400,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	n/a	251,837,000	24 Laporan	250,000,000	26 laporan	300,000,000	30 laporan	330,000,000	32 Laporan	340,000,000	35 laporan	380,000,000	35 laporan	360,000,000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	n/a	110,000,000	90%	252,600,000	92%	510,000,000	93%	563,000,000	94%	400,000,000	95%	300,000,000	95%	300,000,000
Pengadaan Mobil	Jumlah mobil yang diadakan	n/a	-	-	32,500,000	-	-	5 Unit	40,000,000	-	-	5 Unit	100,000,000	5 Unit	100,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan gedung kantor tiap tahun	n/a	110,000,000	1 Unit	120,000,000	1 Unit	130,000,000	1 Unit	140,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	180,000,000	1 Unit	180,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	n/a	-	-	-	1 Unit	350,000,000	1 Unit	350,000,000	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan	n/a	-	-	100,000,000	2 Unit	-	-	-	1 Unit	250,000,000	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	n/a	-	-	-	3 Unit	30,000,000	3 Unit	33,000,000	-	-	4 Unit	40,000,000	4 Unit	40,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang ususan pemerintahan yang disediakan	n/a	221,841,552	90%	508,264,000	92%	542,262,000	93%	581,412,000	94%	636,000,000	95%	682,000,000	95%	682,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	n/a	7,360,000	40 buah	8,600,000	45 Buah	9,000,000	50 Buah	10,000,000	55 Buah	11,000,000	60 Buah	12,000,000	60 Buah	12,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	n/a	68,319,552	3 rekening dan 12 Bulan	330,000,000	5 Rekening	356,000,000	5 Rekening	386,000,000	5 Rekening	490,000,000	5 Rekening	480,000,000	5 Rekening	460,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	n/a	156,350,000	12 Bulan dan 6 Orang	160,464,000	4 Jenis Layanan	177,182,000	4 Jenis Layanan	185,412,000	4 Jenis Layanan	195,000,000	4 Jenis Layanan	210,000,000	4 Jenis Layanan	210,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	n/a	105,096,548	90%	165,970,000	92%	218,350,000	93%	243,050,000	94%	249,450,000	95%	258,000,000	95%	258,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	n/a	65,381,548	2 Unit	114,000,000	3 Unit	146,900,000	4 Unit	170,000,000	4 Unit	175,000,000	4 Unit	180,000,000	4 Unit	180,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perawatan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	n/a	13,270,000	3 Unit	37,420,000	4 Unit	55,400,000	5 Unit	56,400,000	6 Unit	87,400,000	6 Unit	80,000,000	6 Unit	60,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	n/a	7,500,000	5 Unit	8,650,000	6 Unit	9,650,000	6 Unit	9,650,000	5 Unit	9,650,000	8 Unit	10,000,000	8 Unit	10,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	n/a	2,640,000	1 Unit	5,900,000	1 Unit	6,600,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,400,000	1 Unit	8,000,000	1 Unit	8,000,000
Program Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Teta Koneksi SPBG	n/a	442,323,780	3 Indeks	1,630,000,000	3,2 Indeks	1,575,000,000	3,3 Indeks	1,612,000,000	3,4 Indeks	1,880,000,000	3,5 Indeks	1,970,000,000	3,5 Indeks	1,970,000,000
Pengadaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase domain yang terkoneksi.Persentase sub domain yang terkoneksi	n/a	36,000,000	100%,80%	640,000,000	100%, 82%	540,000,000	100%, 83%	542,000,000	100%, 84%	594,000,000	100%, 85%	706,000,000	100%, 85%	706,000,000
Penetalsaraan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain yang berjalan dengan baik, Jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	n/a	36,000,000	1 Domain, 20 Sub Domain	40,000,000	1 Domain, 28 Sub Domain	40,000,000	1 Domain, 30 Sub Domain	42,000,000	1 Domain, 31 Sub Domain	44,000,000	1 Domain, 32 Sub Domain	48,000,000	1 Domain, 32 Sub Domain	48,000,000
Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintahan daerah	Jumlah OPD yang terhubung ke jaringan intra pemerintahan daerah	n/a	-	-	800,000,000	3 OPD	500,000,000	7 OPD	500,000,000	10 OPD	590,000,000	15 OPD	640,000,000	15 OPD	640,000,000
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	n/a	406,323,780	99%	990,000,000	65%	1,035,000,000	68%	1,070,000,000	71%	1,386,000,000	75%	1,364,000,000	75%	1,364,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yg konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tahun 2021-2026 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitik beratkan kepada 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Sasaran Strategis		2021	2022	2023	2024	2025	2026
SS.1	Implementasi Penyelenggaraan e-Government						
IKS.1	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	76	79	82	85	88	90
IKS.2	Persentase pengamanan informasi daerah	55	60	65	70	75	80
SS.2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik						
IKS.2	Persentase penyebaran informasi publik	50	55	60	65	70	75
IKS.2	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	20	25	30	35	40	45
SS.3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas						
IKS.3	Nilai LHE AKIP Diskominfo	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84

Indikator tersebut diatas tentu mendukung sekali terhadap pencapaian kinerja pada RPJMD yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tujuan daerah dan indikator Indeks SPBE pada sasaran daerah, apabila indikator perangkat daerah berhasil dicapai maka indikator pemerintah daerah pun akan mendapatkan hasil yang optimal yaitu dengan predikat Baik pada akhir periode masa RPJMD.

subnansa pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah dokumen sinkronisasi pengelolaan rencana induk yang dibuat	n/a	-	3 Rencana Induk	250,000,000	-	1 Rencana Induk	150,000,000	-	-	-						
pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah server fisik pemerintah daerah yang dibuat. Jumlah aplikasi yang terinstall di pusat data pemerintah daerah	n/a	2 Unit, 5 Sistem	144,000,000	4 Unit, 7 Sistem	200,000,000	4 Unit, 10 Sistem	210,000,000	5 Unit, 13 Sistem	220,000,000	9 Unit, 20 Sistem	280,000,000	3 Unit, 25 Sistem	250,000,000	-		
Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah implementasi proses bisnis berbasis elektronik. Jumlah aplikasi yang dikembangkan	n/a	10, 3 Sistem	109,800,000	10, 4 Sistem	200,000,000	16, 5 Sistem	200,000,000	20, 6 Sistem	210,000,000	26, 7 Sistem	220,000,000	30, 8 Sistem	230,000,000	30, 8 Sistem	230,000,000	
Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Jumlah Sumber Daya TIK yang dibuat	n/a	1 Sumber Daya	152,327,700	1 Sumber Daya	340,000,000	1 Sumber Daya	340,000,000	1 Sumber Daya	345,000,000	1 Sumber Daya	360,000,000	1 Sumber Daya	364,000,000	1 Sumber Daya	364,000,000	
Pengembangan dan Pengelolaan Biosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah pengembangan Infrastruktur Kabupaten cerdas, Cakupan pengelolaan ekosistem Kabupaten Cerdas	n/a	-	-	-	-	1 Jenis	280,000,000	1 Jenis, 20 %	280,000,000	1 Jenis, 30 %	360,000,000	1 Jenis, 50 %	360,000,000	1 Jenis, 50 %	360,000,000	
Monitoring evaluasi dan Pelaporan pengembangan ekosistem SP2E	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi SP2E	n/a	-	-	-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	56,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000
Progran pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik. Persentase tata kelola komunikasi publik	n/a	55%, 55%	1,522,139,974	60%, 60%	1,673,000,000	65%, 65%	1,953,000,000	70%, 70%	2,021,000,000	75%, 75%	2,170,000,000	80%, 80%	2,360,000,000	80%, 80%	2,360,000,000	
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan. Persentase pengelolaan media massa dan lainnya	n/a	55%, 55%	1,522,139,974	60%, 60%	1,673,000,000	65%, 65%	1,953,000,000	70%, 70%	2,021,000,000	75%, 75%	2,170,000,000	80%, 80%	2,360,000,000	80%, 80%	2,360,000,000	
Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah kebijakan teknis bidang informasi publik yang dihasilkan dengan baik. Jumlah kebijakan teknis bidang komunikasi publik yang dihasilkan dengan baik	n/a	-	-	-	8 Kebijakan	100,000,000	10 Kebijakan	120,000,000	12 Kebijakan	140,000,000	14 Kebijakan	160,000,000	14 Kebijakan	160,000,000	14 Kebijakan	160,000,000
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi publik sesuai lingkup kornho yang diindaklanjuti	n/a	25 Opini dan Aspirasi	30,899,974	35 Opini dan Aspirasi	34,000,000	40 Opini dan Aspirasi	34,000,000	45 Opini dan Aspirasi	35,000,000	50 Opini dan Aspirasi	40,000,000	55 Opini dan Aspirasi	50,000,000	55 Opini dan Aspirasi	50,000,000	
Monitoring internal dan penerapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada publik	n/a	-	-	-	2 Jenis	34,000,000	2 Jenis	34,000,000	2 Jenis	35,000,000	2 Jenis	40,000,000	2 Jenis	50,000,000	2 Jenis	50,000,000
Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten yang dipublikasikan	n/a	-	-	-	5 Konten	40,000,000	6 Konten	40,000,000	7 Konten	45,000,000	8 Konten	40,000,000	9 Konten	50,000,000	9 Konten	50,000,000
Pengelolaan Media dan komunikasi Publik	Jumlah media online yang dibuat. Jumlah media sosial yang dibuat. Jumlah video tron yang dibuat	n/a	1 Media Online, 4 Sosmed	87,340,000	1 Media Online, 4 Sosmed, 2 Reklame, 2 Videotron	90,000,000	2 Media Online, 4 Sosmed, 2 Reklame, 2 Videotron	93,000,000	2 Media Online, 4 Sosmed, 3 Reklame, 3 Video tron	98,000,000	3 Media Online, 4 Sosmed, 4 Reklame, 4 Videotron	100,000,000	3 Media Online, 4 Sosmed, 5 Reklame, 5 Videotron	110,000,000	3 Media Online, 4 Sosmed, 5 Reklame, 5 Videotron	110,000,000	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disediakan ke publik	n/a	48 Informasi Publik	63,000,000	72 Informasi Publik	50,000,000	96 Informasi Publik	55,000,000	120 Informasi Publik	58,000,000	144 Informasi Publik	60,000,000	168 Informasi Publik	70,000,000	168 Informasi Publik	70,000,000	
Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah SDM komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	n/a	-	-	-	70 SDM	25,000,000	100 SDM	25,000,000	130 SDM	30,000,000	200 SDM	40,000,000	250 SDM	50,000,000	250 SDM	50,000,000
Pemeliharaan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Hubungan Masyarakat yang terjalin. Jumlah hubungan dengan media yang terjalin. Jumlah kerjasama kemitraan komunitas yang terjalin	n/a	3 Media	1,350,000,000	2 KIM, 3 Media, 3 Kemitraan	1,400,000,000	3 KIM, 3 Media, 3 Kemitraan	1,450,000,000	4 KIM, 3 Media, 4 Kemitraan	1,500,000,000	5 KIM, 3 Media, 5 Kemitraan	1,600,000,000	6 KIM, 3 Media, 6 Kemitraan	1,700,000,000	6 KIM, 3 Media, 6 Kemitraan	1,700,000,000	
Pemeliharaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dibuat	n/a	-	-	-	13 Unit	100,000,000	14 Unit	100,000,000	14 Unit	100,000,000	18 Unit	110,000,000	16 Unit	110,000,000	16 Unit	110,000,000

	URUSAN PERSANDIAN				172,918,000		190,000,000		205,000,000		220,000,000		240,000,000		260,000,000		260,000,000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	n/a	15%	172,918,000	20%	190,000,000	25%	205,000,000	30%	220,000,000	35%	240,000,000	40%	260,000,000	40%	260,000,000
	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah	n/a	15%	149,998,000	20%	180,000,000	25%	160,000,000	30%	170,000,000	35%	180,000,000	40%	190,000,000	40%	190,000,000
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah aplikasi yang diuji keamanannya,Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik	n/a	2 Aplikasi	149,998,000	3 Aplikasi	180,000,000	4 Aplikasi	160,000,000	5 Aplikasi	170,000,000	6 Aplikasi	180,000,000	7 Aplikasi	190,000,000	7 Aplikasi	190,000,000
	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun	n/a	1 Prosedur	22,920,000	1 Prosedur	40,000,000	2 Prosedur	45,000,000	3 Prosedur	50,000,000	4 Prosedur	60,000,000	5 Prosedur	70,000,000	5 Prosedur	70,000,000
	Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah komunikasi sandi yang berjalan dengan baik	n/a	1 Saluran Komunikasi Sandi	22,920,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	40,000,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	45,000,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	50,000,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	60,000,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	70,000,000	1 Saluran Komunikasi Sandi	70,000,000
	URUSAN STATISTIK				176,999,871		470,000,000		470,000,000		510,000,000		550,000,000		590,000,000		590,000,000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral	n/a	50%	176,999,871	55%	470,000,000	60%	470,000,000	65%	510,000,000	70%	550,000,000	75%	590,000,000	75%	590,000,000
	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan	n/a	1 Publikasi	176,999,871	3 Publikasi	470,000,000	3 Publikasi	470,000,000	3 Publikasi	510,000,000	3 Publikasi	550,000,000	3 Publikasi	590,000,000	3 Publikasi	590,000,000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral dengan OPD,Jumlah pengumpulan dan pengolahan data,Jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral	n/a	3 Kegiatan	176,999,871	4 Kegiatan	200,000,000	4 Kegiatan	200,000,000	4 Kegiatan	210,000,000	4 Kegiatan	220,000,000	4 Kegiatan	230,000,000	4 Kegiatan	230,000,000
	Peningkatan Kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	n/a	-	-	150 SDM	50,000,000	150 SDM	50,000,000	150 SDM	60,000,000	150 SDM	70,000,000	150 SDM	80,000,000	150 SDM	80,000,000
	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun	n/a	-	-	3 Metadata	100,000,000	3 Metadata	100,000,000	3 Metadata	120,000,000	3 Metadata	130,000,000	3 Metadata	140,000,000	3 Metadata	140,000,000
	Pengembangan infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikelola	n/a	-	-	1 Aplikasi	120,000,000	1 Aplikasi	120,000,000	1 Aplikasi	120,000,000	1 Aplikasi	130,000,000	1 Aplikasi	140,000,000	1 Aplikasi	140,000,000
	TOTAL				5,797,489,503		8,452,831,000		8,625,100,000		9,035,738,000		9,580,361,000		10,035,600,000		10,035,600,000

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran**

No	Indiaktor Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	n/a	76	79	82	85	88	90	90
2	Persentase pengamanan informasi daerah	n/a	55	60	65	70	75	80	80
3	Persentase penyebaran informasi publik	n/a	50	55	60	65	70	75	75
4	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	n/a	20	25	30	35	40	45	45
5	Nilai LHE AKIP Diskominfo	89,26	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84	90,84

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan selama masa jabatan Bupati Periode 2021 - 2026. Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis akan menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai.

Rencana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terdapat di rencana strategis tahun 2021- 2026 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi indikator untuk mengukur capaian dari setiap sasaran strategis yang telah disusun. Target pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021- 2026 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai, Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur yang akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKPJ).

Parigi, ²³ September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002